



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PT PLN INDONESIA POWER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDWIN NUGRAHA PUTRA
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 213961

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.051.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/49 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.340.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA/CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **540.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **9.100.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **5.503.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.534.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.534.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.